



## DETERMINAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH

Tutik Yuliani<sup>1</sup>✉, Novita Saragih<sup>2</sup>

<sup>1</sup>)Universitas Balikpapan, Indonesia

<sup>2</sup>)Universitas Negeri Semarang

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3843>

Received: 20 November 2013; Accepted: 12 Desember 2013; Published: Maret 2014

### Abstract

*The success of development is measured by several factors. One of them is Human Development Index. Human plays important role in production factor in economy. This research aims to analyze factors determining human development in regency/city in Central Java province. Multiple Linear regression analysis is used to analyze the data by using GLS (Generalized Least Square). The research found that unemployment, economic growth and expenditure affect significantly Human Index Development in regency/city in Central Java province.*

**Keywords:** *Human Index Development, production factor, GLS*

### Abstrak

Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Manusia memiliki peran sebagai faktor produksi yang sangat penting dalam perekonomian. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor apa yang menentukan pembangunan manusia di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode GLS (*Generalized Least Square*). Hasil penelitian menunjukkan pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

**Kata Kunci:** *Index Pembangunan Manusia, Faktor Produksi, Generalized Least Square (GLS)*

**How to Cite:** Yuliani, T., dan Saragih, N. (2014). Determinan Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. JEJAK Journal of Economics and Policy, 7 (1): 60-72 doi: 10.15294/jejak.v7i1.3843

## PENDAHULUAN

Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Manusia bukan hanya merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subyek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu wilayah yang secara makro menjadi kemajuan suatu Negara. Prasetyo (2008). Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter yang paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). IPM merupakan indikator komposit yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai sebagai cerminan kemampuan dasar manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia bahwa diantaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat

Pembangunan ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan, menanggulangi ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja. Salah satu indikator terpenting yang menggambarkan keberhasilan perkembangan ekonomi yaitu

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini karena manusia memiliki peran sebagai faktor produksi yang sangat penting dalam perekonomian. Paradigma pembangunan saat ini juga diukur dari kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia. Mirza (2011).

Keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial. Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat tergantung komitmen pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang. Peran pemerintah sebagai penyusun kebijakan sangat dibutuhkan untuk memberi kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dalam perekonomian modern, peran pemerintah sebagaimana dikatakan Musgrave (1989) dikelompokkan menjadi tiga yaitu peranan dalam alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Kaitan antara pengeluaran untuk sektor publik terhadap pembangunan manusia sebenarnya mudah untuk ditelusuri. Pengeluaran untuk bidang kesehatan diharapkan mampu meningkatkan angka harapan hidup maupun menurunkan angka kematian ibu hamil dan bayi sebagai salah satu komponen dalam penentuan pembangunan manusia. Anggaran dalam bidang pendidikan akan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, sehingga mampu meningkatkan angka melek huruf. Anggaran dalam bidang infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat dalam bidang ekonomi sehingga akan terjadi efisiensi dan akan meningkatkan konsumsi riil per kapita.

Jika dilihat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami peningkatan tahun 2007-2011. Hal ini dilihat dari besarnya laju

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu:

**Tabel 1.** Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011

Tahun	PDRB (Jutaan Rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2007	159.110.253,76	5,59
2008	168.034.483,29	5,61
2009	176.673.456,57	5,14
2010	186.995.480,65	5,84
2011	198.226.349,47	6,01

Sumber : BPS Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang fluktuatif pada tahun 2007-2011. Pada umumnya tingginya PDRB tidak diimbangi dengan pembangunan manusia yang seimbang, sehingga dapat menimbulkan adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan akhirnya tidak menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, PM bukan berarti mengabaikan peran PDRB sebagai indikator pembangunan manusia di suatu daerah.

**Tabel 2.** Perkembangan IPM Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011

No	Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
1	Kab. Cilacap	70,25	70,91	71,39	71,73	72,34
2	Kab. Banyumas	71,23	71,77	72,27	72,60	72,96
3	Kab. Purbalingga	70,38	70,89	71,51	72,07	72,50
4	Kab. Banjarnegara	68,54	68,99	69,63	69,91	70,39
5	Kab. Kebumen	69,96	70,19	70,73	71,12	71,62
6	Kab. Purworejo	70,68	71,29	71,88	72,55	72,91
7	Kab. Wonosobo	69,22	69,55	70,08	70,52	71,06
8	Kab. Magelang	71,03	71,43	71,76	72,08	72,69
9	Kab. Boyolali	69,63	69,99	70,44	70,72	71,25
10	Kab. Klaten	72,48	72,93	73,41	73,83	74,10
11	Kab. Sukoharjo	72,46	73,01	73,29	73,57	73,97
12	Kab. Wonogiri	70,11	70,47	71,04	71,33	71,86
13	Kab. Karanganyar	71,59	72,21	72,55	73,19	73,82
14	Kab. Sragen	68,98	69,57	70,27	71,00	71,33
15	Kab. Grobogan	69,75	70,22	70,60	70,83	71,27
16	Kab. Blora	69,11	69,63	70,14	70,61	71,25
17	Kab. Rembang	70,54	71,12	71,55	72,07	72,45
18	Kab. Pati	71,87	72,26	72,72	72,96	73,49
19	Kab. Kudus	71,66	72,02	72,57	72,95	73,24
20	Kab. Jepara	71,45	71,94	72,45	72,64	73,12
21	Kab. Demak	71,05	71,56	72,10	72,58	73,09
22	Kab. Semarang	72,93	73,34	73,66	74,10	74,45
23	Kab. Temanggung	73,08	73,43	73,85	74,11	74,47
24	Kab. Kendal	68,91	69,40	70,07	70,41	70,85
25	Kab. Batang	68,64	69,23	69,84	70,41	71,06
26	Kab. Pekalongan	69,69	70,31	70,83	71,40	71,86
27	Kab. Pemalang	67,89	68,38	69,02	69,89	70,22
28	Kab. Tegal	68,83	69,54	70,08	70,59	71,09
29	Kab. Brebes	66,57	67,08	67,69	68,20	68,61
30	Kota Magelang	75,69	76,09	76,37	76,60	76,83
31	Kota Surakarta	76,58	77,16	77,49	77,86	78,18
32	Kota Salatiga	75,37	75,81	76,11	76,53	76,83
33	Kota Semarang	76,11	76,54	76,90	77,11	77,42
34	Kota Pekalongan	73,10	73,49	74,01	74,47	74,90
35	Kota Tegal	72,72	73,20	73,63	73,89	74,20
	Jawa Tengah	70,92	71,60	72,10	72,49	72,94

Sumber : BPS Jawa Tengah (data diolah)

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata IPM selama tahun 2007-2011 kabupaten/kota Jawa Tengah memiliki perkembangan yang positif. Rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah adalah 71,98 sehingga ada 16 daerah yang memiliki IPM rata-rata di atas rata-rata Provinsi Yang terdiri dari 6 kota dan 10 kabupaten dan sisanya 19 kabupaten memiliki IPM rata-rata dibawah rata-rata IPM provinsi. Sebagian besar IPM kabupaten berada di bawah rata-rata IPM provinsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM wilayah kota lebih tinggi dibanding dengan rata-rata IPM kabupaten. IPM tertinggi dimiliki oleh Kota Surakarta yaitu dengan rata-rata 77,44 dan IPM terendah dimiliki oleh Kabupaten Brebes dengan rata-rata 67,62.

Perkembangan IPM di setiap daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan, hanya saja nilai IPM masing-masing daerah bervariasi. Hal ini dikarenakan fokus pembangunan yang berbeda dan faktor-faktor pendukung lain yang berbeda seperti tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah untuk mendukung pembangunan daerah di masing-masing kabupaten/kota.

UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia terdapat empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Paradigma pembangunan manusia memiliki dua sisi. Sisi pertama berupa informasi kapabi-

litas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik. Jika kedua sisi itu tidak seimbang maka hasilnya adalah frustrasi masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang dijadikan alat ukur dalam pemantauan pembangunan manusia, terutama dalam mengukur kualitas fisik penduduk di suatu daerah. Oleh karena itu, IPM dijadikan standar keberhasilan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan memadai dan dijadikan tolok ukur kemajuan pembangunan manusia.

IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga), dan tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah). Indeks ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut yakni:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3) \dots (1)$$

Dimana  $X_1$  = Lamanya Hidup;  $X_2$  = Tingkat Pendidikan;  $X_3$  = Tingkat Kehidupan Layak

Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. (Sukirno, 2004: 28). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau

seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan pengertiannya, pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga, antara lain: Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang betul-betul tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.

Adapun pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bisa juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal.

Sedangkan Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. Misalnya seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya.

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) atau secara umum disebut dengan pengangguran, adalah penduduk usia kerja yang tidak mempunyai pekerjaan apapun, yang secara aktif mencari pekerjaan. Pengangguran di negara-negara berkembang bisa dipilah ke dalam dua kelompok, yaitu pengangguran perkotaan dan pedesaan. (BPS, 2000:8)

Secara sederhana pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregatif dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu bangsa atau pembangunan ekonomi suatu bangsa. Masalah pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi; dimana pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi (Prasetyo 2009).

Metode yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi seperti metode sederhana. Metode ini adalah metode yang paling sederhana dalam menghitung pertumbuhan ekonomi. Formulasi dari metode ini adalah sebagai berikut:

$$\Delta PDB_t = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\% \quad (2)$$

Keterangan  $\Delta PDB_t$  = Laju pertumbuhan ekonomi; PDB = Produk Domestik Bruto

Menurut Baswir (1999), secara umum anggaran pemerintah dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode di masa yang akan datang. Struktur anggaran sendiri menggambarkan pengelompokan komponen-komponen anggaran berdasarkan suatu kerangka tertentu. Kebutuhan di bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan di sektor publik tersebut pemerintah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerahnya sendiri. Sehingga dengan otonomi daerah pemerintah daerah akan semakin mampu mencukupi kebutuhannya.

Dalam UUD 1945 disebutkan kesehatan merupakan hak dasar (azasi) manusia, sehingga pemerintah bertanggungjawab memenuhi kebutuhan, perlindungan dan fasilitasi kesehatan kepada rakyatnya. Apalagi dalam tujuan pembangunan nasional telah disebutkan setiap penduduk berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Maka wajar jika kesehatan dapat disebut sebagai investasi pemerintah pada belanja/pengeluaran pembangunan untuk pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Lains dan Pasay (Tjiptoherijanto, 1989) yang lebih menekankan aspek pendidikan dalam pembangunan manusia. Selain itu, mutu manusia dari sisi lain yaitu dari sisi kesehatan dimana kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro. Pengeluaran pemerintah secara mikro dimaksudkan untuk menyediakan barang public yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebagai akibat adanya kegagalan pasar. Teori makro mengenai pengeluaran pemerintah dikemukakan

oleh para ahli ekonomi yaitu Wagner dan pasangan ahli ekonomi Peacock dan Wiseman. Menurut sisi makroekonomi yang dikemukakan Musgrave (1989), adalah untuk menganalisis ukuran pemerintahan sehingga dapat terlihat transaksi anggaran, perusahaan publik dan kebijakan publik. Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk sektor publik semakin banyak barang publik yang tersedia untuk masyarakat.

Khodabakhshi (2011) meneliti bagaimana hubungan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di India dan hasilnya adalah PDB mempunyai dampak yang rendah terhadap IPM. Berbeda dengan penelitian Khodabakhshi (2011), Muhammad et al. (2010) melakukan penelitian dan menemukan bahwa PDB tidak berdampak terhadap IPM di Pakistan. Hal tersebut disebabkan karena adanya ketimpangan pendapatan di Pakistan. Hasil penelitian Ginting et al. (2008), menunjukkan bahwa IPM dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga, rasio penduduk miskin, dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan.

## METODE PENELITIAN

Data yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai sumber yang valid yaitu buku-buku, penelitian terdahulu dan internet. Data tersebut meliputi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen dan variabel independennya adalah jumlah pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011.

Alat analisis data yang digunakan adalah software eviews 6. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode GLS (*Generalized*

*Least Square*) dengan tiga metode mendasar dalam data panel yaitu:

### **Common Effect**

Model *common Effect* yaitu teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Model ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) karena menggunakan kuadrat kecil biasa. Dalam pendekatan ini hanya mengasumsikan bahwa perilaku data antar ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Dengan kata lain, diasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam berbagai kurun waktu.

### **Fixed Effect**

Analisis data panel dengan melihat perbedaan individu (intersep) dengan waktu (slope) yang tetap. Dengan kata lain, perbedaan intersep ini menggambarkan bahwa adanya perbedaan dalam setiap kabupaten/kota dalam mencapai pembangunan manusia. Penggunaan model *fixed effect* tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam mengintrepetasi data. Pemilihan model antara *Common effect* dengan *fixed effect* dapat dilakukan dengan pengujian *Likelihood Test Ratio* dengan ketentuan apabila nilai probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat diambil keputusan menggunakan *fixed effect model*.

### **Random Effect**

Dalam model efek acak, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam error. Karena hal inilah, model efek acak juga dise-

but model komponen error (*error component model*). Dengan menggunakan model efek acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin efisien. Keputusan penggunaan model efek tetap ataupun acak ditentukan dengan menggunakan Uji Hausman dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat digunakan metode *fixed effect*, apabila sebaliknya maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara model *fixed effect* dengan *random effect*.

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka analisis data dibatasi pada empat variabel, yaitu pembangunan manusia (IPM), jumlah pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Secara ekonometrika, hubungan antara pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011 dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan berikut :

$$IPM = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ PENGG} + \alpha_2 \text{ GRWTH} + \alpha_3 \text{ PNGLPRT} + \mu \quad (3)$$

Namun karena adanya beda variabel independen, maka persamaan regresi ditransformasikan ke logaritma berganda dengan menggunakan logaritma natural (ln) menjadi sebagai berikut:

$$IPM = \alpha_0 + \alpha_1 \text{ LNPENGG} + \alpha_2 \text{ GRWTH} + \alpha_3 \text{ LNPNGLPRT} + \mu \quad (4)$$

Keterangan: IPM = Indeks Pembangunan Manusia (skala 0-100); PENGG= Jumlah pengangguran (orang); GRWTH = Pertumbuhan Ekonomi (persen); PNGLPRT = Pengeluaran Pemerintah (Rupiah);  $\alpha_0$  =

konstanta;  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  = koefisien;  $\mu$ =error term.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui seberapa besar pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, maka dilakukan pemilihan model yang terbaik. Model yang akan dipilih adalah *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Dalam memilih salah satu model yang terbaik dari ketiga model tersebut maka dilakukan uji signifikansi *fixed effect* dengan *likelihood test ratio* dan *hausman test*.

Berdasarkan hasil uji *common effect*, *fixed effect* dan *random effect model* dapat diketahui hasilnya seperti pada tabel 3 di

bawah.

Dari tabel 3 dapat diketahui hasil masing masing metode. Pada uji *common effect* dapat diketahui bahwa koefisien -1,676676 pada  $X_1$  (pengangguran) dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa pengangguran memiliki hubungan negatif dan signifikan pada alpha 5% dengan pembangunan manusia. Koefisien 0,541907 pada  $X_2$  (pertumbuhan ekonomi) dengan probabilitas 0,0070 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dan signifikan pada alpha 5% terhadap pembangunan manusia. Koefisien 0,257694 pada  $X_3$  (pengeluaran pemerintah) dengan probabilitas 0,5935 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif dengan indeks pembangunan manusia namun tidak signifikan pada alpha 5%.

**Tabel 3.** Hasil output common effect, fixed effect dan random effect

No	Variabel	Model		
		Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
1	Indeks Pembangunan Manusia (Konstanta)	79,70134	34,72753	46,22065
	Standar error	11,33517	8,970268	8,474321
	Probabilitas	0,0000*	0,0002*	0,0000*
2	Pengangguran	-1,676676	-1,323549	-1,491622
	Standar error	0,347738	0,276060	0,260960
	Probabilitas	0,0000*	0,0000*	0,0000*
3	Pertumbuhan Ekonomi	0,541907	0,139948	0,047302
	Standar error	0,198475	0,175711	0,163850
	Probabilitas	0,0070*	0,4272	0,7732
4	Pengeluaran Pemerintah	0,257694	1,927310	1,526823
	Standar error	0,481850	0,348575	0,336322
	Probabilitas	0,5935	0,0000*	0,0000*
5	R <sup>2</sup>	0,176840	0,754179	0,180890
6	Adj-R <sup>2</sup>	0,162228	0,686806	0,166350
7	F-statistic	12,10216	11,19406	12,44051
	Probabilitas F-statistic	0,000000*	0,000000*	0,000000*
8	Durbin Watson	0,496247	1,191919	0,325512

Sumber: Data diolah

Keterangan(\*) signifikan pada alpha 5%

Nilai *R-Squared* sebesar 0,176840 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah) menjelaskan variabel dependen (indeks pembangunan manusia) adalah sebesar 17,68%.

Pada *common effect* diperoleh nilai F-statistic sebesar 12,10216 dengan probabilitas 0,000000. Hasil F-statistic dengan df numerator 3 dan denominator 172 diperoleh F-tabel 2,47. F-statistic > F-tabel dengan demikian dapat disimpulkan variabel independen (pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011.

Pada uji *fixed effect* dapat diketahui bahwa koefisien -1,323549 pada  $X_1$  (pengangguran) dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa pengangguran memiliki hubungan negatif dan signifikan pada alpha 5% dengan pembangunan manusia. Koefisien 0,139948 pada  $X_2$  (pertumbuhan ekonomi) dengan probabilitas 0,4272 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan pada alpha 5% terhadap pembangunan manusia. Koefisien 1,927310 pada  $X_3$  (pengeluaran pemerintah) dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif dengan indeks pembangunan manusia dan signifikan pada alpha 5%.

Nilai *R-Squared* sebesar 0,754179 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah) menjelaskan variabel dependen (indeks pembangunan manusia) adalah sebesar 75,41%.

Pada *fixed effect* diperoleh nilai F-statistic sebesar 11,19406 dengan probabilitas

0,000000. Hasil F-statistic dengan df numerator 3 dan denominator 172 diperoleh F-tabel 2,47. F-statistic > F-tabel dengan demikian dapat disimpulkan variabel independen (pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011.

Pada uji *random effect* dapat diketahui bahwa koefisien  $X_1$  (pengangguran) sebesar -1,491622 dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa pengangguran memiliki hubungan negatif dan signifikan pada alpha 5% dengan pembangunan manusia. Koefisien  $X_2$  (pertumbuhan ekonomi) sebesar 0,047302 dengan probabilitas 0,7732 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan pada alpha 5% terhadap pembangunan manusia. Koefisien  $X_3$  (pengeluaran pemerintah) sebesar 1,526823 dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif dan signifikan pada alpha 5% terhadap indeks pembangunan manusia.

Nilai *R-Squared* sebesar 0,180890 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah) menjelaskan variabel dependen (indeks pembangunan manusia) adalah sebesar 18,08%.

Pada *random effect* diperoleh nilai F-statistik sebesar 12,44051 dengan probabilitas 0,000000. Hasil F-statistik dengan df numerator 3 dan denominator 172 diperoleh F-tabel 2,47. F-statistik > F-tabel dengan demikian dapat disimpulkan variabel independen (pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011.

Untuk memilih model yang terbaik dari ketiga model tersebut maka harus dilakukan uji signifikansi *fixed effect* dan dilanjutkan dengan uji haussman. Dari uji Signifikansi *Fixed effect* maka telah diperoleh hasil seperti pada tabel 4 berikut.

Berdasarkan hasil uji signifikansi *fixed effect (common effect vs fixed effect)* dengan hasil seperti pada tabel 4 yaitu nilai probabilitas *cross-section F* sebesar 0,0000 dan nilai probabilitas *cross-section chi-square* adalah 0,0000 dimana keduanya signifikan pada alpha 5%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* yang lebih baik digunakan pada model ini daripada *common effect*. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan uji haussman. Sementara dari uji Signifikansi *fixed effect* diperoleh hasil seperti pada tabel 5.

Dengan melakukan uji hausman (*fixed effect vs random effect*) maka diperoleh hasil seperti pada tabel 5. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui dengan melihat nilai probabilitas *cross-section random* yaitu sebesar 0,0002. Nilai ini signifikan pada alpha 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan model *fixed effect* yang lebih baik digunakan daripada *random effect*.

Dengan kedua uji tersebut yaitu uji

signifikansi *fixed effect* dan uji haussman, dengan hasil-hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih baik digunakan dalam analisis data panel pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. Hasil uji *fixed effect model* yang telah diuji dengan asumsi klasik dengan metode *Generalized Least Square (GLS)* dapat dilihat seperti pada tabel 6.

Dari tabel 6 hubungan antara pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011 dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan berikut:

$$IPM = \alpha_0 + \alpha_1 \text{PENGG} + \alpha_2 \text{GRWTH} + \alpha_3 \text{PNGLPRT} + \mu \tag{5}$$

$$IPM = 32,35205 - 1,328921 \text{PENGG} + 0,132939 \text{GRWTH} + 2,017004 \text{PNGLPRT} \tag{6}$$

Keterangan: IPM = Indeks Pembangunan Manusia (sakala 0-100); PENGG= Jumlah Pengangguran (orang); GRWTH= Pertumbuhan Ekonomi (persen); PNGLPRT= Pengeluaran Pemerintah (Rupiah).

**Tabel 4.** Hasil uji *Likelihood Ratio*

Effect Test	Statistic	d.f	Probabilitas
Cross-section F	9,325381	(34.135)	0,0000
Cross-section Chi-square	209,078578	34	0,0000

Sumber: BPS, data diolah

**Tabel 5.** Hasil uji haussman

Test Summary	Chi-Sq Statistik	Chi-Sq d.f	Probabilitas
Cross-section random	20,228318	3	0,0002

Sumber: BPS, data diolah

Tabel 6. Hasil uji fixed effect model

Variabel	Koefisien	Std.eror	t-statistik	Prob.	R <sup>2</sup>	F-statistik
IPM (Y)	32,35205	3,251873	9,948744	0,0000		
PENGG (X <sub>1</sub> )	-1,328921	0,149864	-8,867520	0,0000		63,60845
GROWTH (X <sub>2</sub> )	0,132939	0,062569	2,124670	0,0354	0,945751	Prob.
FISCAL (X <sub>3</sub> )	2,017004	0,130646	15,43865	0,0000		0,000000

Sumber : BPS, data diolah.

Berdasarkan hasil uji *fixed effect* tersebut dapat diketahui bahwa koefisien 32,35205 pada konstanta (IPM) berarti jika nilai variabel independen X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, dan X<sub>3</sub> (pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah) adalah nol maka pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 32,35205. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa konstanta (IPM) untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah bahwa IPM di kabupaten lebih rendah daripada IPM di kota.

Koefisien -1,328921 pada X<sub>1</sub> (pengangguran) dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa ketika nilai pengangguran meningkat 1 orang maka pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah akan menurun sebesar 1,328921. Dengan nilai probabilitas yang demikian maka pengangguran memiliki hubungan negatif dan signifikan pada alpha 5% dengan pembangunan manusia.

Koefisien 0,132939 pada X<sub>2</sub> (pertumbuhan ekonomi) dengan probabilitas 0,0354 menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Jawa Tengah meningkat satu persen maka pembangunan manusia akan meningkat sebesar 0,132939. Dengan nilai probabilitas yang demikian maka pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif terhadap pembangun-

an manusia dan signifikan pada alpha 5%. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka produktivitas ekonomi akan meningkat pula. Dengan demikian adanya peningkatan produktivitas ini akhirnya akan meningkatkan Pembangunan Manusia.

Koefisien X<sub>3</sub> 2,017004 (pengeluaran pemerintah) dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa ketika pengeluaran pemerintah meningkat 1 Rupiah maka pembangunan manusia kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah akan meningkat sebesar 2,017004. Dengan nilai probabilitas yang demikian maka pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif dengan indeks pembangunan manusia dan signifikan pada alpha 5%. Jika pengeluaran pemerintah meningkat, khususnya pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan akan dapat meningkatkan pembangunan manusia. Hal ini disebabkan dengan pengeluaran di bidang pendidikan akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di daerah masing-masing dan akhirnya peningkatan kualitas pendidikan ini akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Demikian juga pengeluaran bidang kesehatan sangat penting untuk meningkatkan pembangunan manusia karena dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan akan meningkatkan kualitas tingkat kesehatan masyarakat. Jika kesehatan masyarakat

memiliki kualitas yang baik dan peningkatan kualitas pendidikan akan dapat meningkatkan SDM dan akhirnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Nilai *R-Squared* sebesar 0,945751 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah) menjelaskan variabel dependen (indeks pembangunan manusia) sebesar 75,41% dan sisanya 24,59% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai *R-Squared* ini tergolong tinggi.

Pada *fixed effect* diperoleh nilai F-statistic sebesar 63,60845 dengan probabilitas 0,000000. Hasil F-statistic dengan df numerator 3 dan denominator 172 diperoleh F-tabel 2,47. F-statistic > F-tabel dengan demikian dapat disimpulkan variabel independen (pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2007-2011 mengalami peningkatan setiap kota/kabupaten. IPM rata-rata selama tahun 2007-2011 adalah 71,98 dan masuk dalam kategori IPM menengah.

Dari hasil analisis regresi data panel yaitu pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011 diperoleh hasil bahwa Pengangguran memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan pada alpha 5% terhadap Indeks Pmba-

ngunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa jika jumlah pengangguran meningkat maka Indeks Pembangunan Manusia akan menurun. Koefisien negatif menyatakan apabila jumlah pengangguran meningkat satu orang maka akan menurunkan IPM sebesar 1,328. Signifikansi variabel pengangguran terhadap IPM ditunjukkan dengan probabilitas 0,0000 signifikan pada alpha 5%.

Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada alpha 5% terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka Indeks Pembangunan Manusia akan menurun. Koefisien positif menyatakan apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1% maka akan meningkatkan IPM sebesar 0,132. Variabel pertumbuhan ekonomi signifikan terhadap IPM ditunjukkan dengan probabilitas 0,0354 tidak signifikan pada alpha 5%.

Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada alpha 5% terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa jika jumlah pengeluaran pemerintah meningkat maka Indeks Pembangunan Manusia akan menurun. Koefisien positif menyatakan apabila jumlah pengeluaran pemerintah meningkat satu Rupiah maka akan meningkatkan IPM sebesar 2,017. Signifikansi variabel pengangguran terhadap IPM ditunjukkan dengan probabilitas 0,0000 signifikan pada alpha 5%.

Pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrisond. (1999). *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- BPS Jawa Tengah. (2010). *Jawa Tengah Dalam Angka 2010*. Jawa Tengah : BPS Jawa Tengah.
- . (2011). *Jawa Tengah Dalam Angka 2011*. Jawa Tengah : BPS Jawa Tengah.
- . (2012). *Jawa Tengah Dalam Angka 2012*. Jawa Tengah : BPS Jawa Tengah.
- Ginting, Charisma Kurianta K.S. et al. (2008). Pembangunan Di Indonesia dan Faktor - factor yang Mempengaruhinya. *Wahana Hijau, Jurnal Perencana andan Pembangunan Wilayah*, Vol 4, No 1. Agustus 2008
- Khodabakhshi, Akbar. (2011). Relationship between GDP and Human Development Indices in India. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, Vol. 2, No. 3, June 2011.
- Mirza, Denni Sulistio. (2011). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap IPM Jawa Tengah. *JEJAK, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Unnes*. Vol. 4 No. 2
- Muhammad, Sulaiman D. Et al. (2010). Impact of Globalization on HDI (Human Development Index): Case Study of Pakistan. *European Journal of Social Sciences* - Volume 13, Number 1 (2010)
- Musgrave, Richard A., dan Musgrave Peggy B. (1989). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga .
- Prasetyo, P. Eko. (2008). The Quality of Growth: Peran Teknologi dan Investasi Human Capital Sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. *JEJAK, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Unnes*, Vol 1 No 1.
- Prasetyo, P.Eko. (2009). *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Reddy, T. Koti. (2009) Progress of Human Development in India. *J Soc Sci*, 18(1): 13-19 (2009).
- Sukirno, Sadono. (2005). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tjiptoherijanto, Prijono. (1989). *Untaian Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFE - UI.
- UNDP. (1995). *Human Development Report*. New York: Oxford University Press.
- \_\_\_\_\_. *Bab II Landasan Teori Indeks Pembangunan Manusia*. Medan: Universitas Sumatera Utara. Website: [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18185/4/Chapter%20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18185/4/Chapter%20II.pdf).
- \_\_\_\_\_. *Bab II Tinjauan Pustaka Pengangguran* .Medan: Universitas Sumatera Utara website: [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37731/2/Chapter%20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37731/2/Chapter%20II.pdf).
- \_\_\_\_\_. *Bab II Landasan Teori Pengeluaran Pemerintah*. Medan: Universitas Sumatera Utara. Website: [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16787/4/Chapter%20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16787/4/Chapter%20II.pdf).
- \_\_\_\_\_. *Bab II Landasan Teori Pengeluaran Pemerintah*. Medan: Universitas Sumatera Utara. website: [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16787/4/Chapter%20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16787/4/Chapter%20II.pdf).